

STRATEGI KEBIJAKAN MUTU DAN STANDAR PRODUK EKSPOR DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING (STUDI KASUS PRODUK EKSPOR BIJI KAKAO)

Widyastutik^{*)}¹ dan Reni Kristina Arianti^{**)}

^{*)}Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor
Jl. Kamper Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680

^{**)}Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
Jl. M. I. Ridwan Rais, No. 5, Jakarta Pusat 10110

ABSTRACT

This study aimed to 1) analyze the competitiveness of cocoa bean as an exported commodity which obligated to standardized quality control and 2) analyze the strategies to increase policies and strategies to enhance the standard and the quality of cocoa bean in order to have a better competitiveness. This study used RCA (Revealed Comparative Advantage) and AHP (Analytical Hierarchy Process) as the analytical methods. The resulted show that the highest average value of the cocoa beans RCAB is Indonesian-German trade. In series, the value of cocoa beans RCAB tend to be stable for all major export destinations except to India. Based on the AHP results, the recommendation to the government as well as to the quality and standard institution as a strategy to enhance exported cocoa beans' quality and standard is by increasing the quality and quantity of infrastructures standard and quality.

Keywords: competitiveness, cocoa beans, RCA, AHP, quality policy

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan 1) menganalisis daya saing biji kakao sebagai produk ekspor yang ditetapkan pengawasan mutunya secara wajib dan 2) menganalisis strategi kebijakan peningkatan standar dan mutu biji kakao dalam rangka peningkatan daya saing. Penelitian ini menggunakan RCA (Revealed Comparative Advantage) dan AHP (Analytical Hierarchy Process) sebagai metode analisis. Hasil penelitian menunjukkan nilai rata-rata RCA untuk biji kakao tertinggi adalah perdagangan Indonesia-Jerman. Secara series, nilai RCAB biji kakao cenderung stabil untuk semua negara tujuan ekspor utama kecuali ke India. Hasil AHP, rekomendasi yang dapat diajukan kepada pemerintah dan lembaga mutu dan standar sebagai strategi peningkatan mutu dan standar produk ekspor biji kakao adalah dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur standar dan mutu.

Kata kunci: daya saing, biji kakao, RCA, AHP, kebijakan mutu

¹ Alamat Korespondensi :

E-mai: widyastutik_ipb@yahoo.com

PENDAHULUAN

Perdagangan bebas memaksa produsen untuk meningkatkan efisiensi dan menghasilkan produk yang memenuhi standar secara konsisten agar dapat bertahan dan memenangkan persaingan, baik dalam menghadapi pasar dalam negeri maupun pasar internasional. Standar melalui pengukuran dan pengujian akan menghasilkan sertifikasi disahkan oleh lembaga akreditasi yang memiliki kompetensi teknis sehingga menghasilkan produk siap masuk ke pasar internasional dan bersaing dengan produk negara lain. Bagi konsumen,

akan tersedia pilihan produk yang lebih luas baik produk dalam negeri maupun impor. Di samping itu, kebutuhan masyarakat akan semakin meningkat karena peningkatan taraf hidup mereka berpindah dari yang berorientasi harga ke kualitas. Jumlah produk Indonesia yang memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) dan dinotifikasi oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) tahun 2008 tertinggal jauh dibanding dengan negara-negara lainnya. Hal ini menyebabkan Indonesia sulit untuk melakukan penetrasi ke pasar internasional (Pusat Kerja sama Standardisasi Badan Standardisasi Nasional, 2012).

Indonesia baru memiliki 66 jenis produk yang telah memiliki SNI dan sudah dinotifikasi ke WTO. Apabila dibandingkan dengan Thailand dan Singapura, produk Indonesia yang memiliki SNI ternotifikasi di WTO lebih sedikit. Oleh karena itu, relevan dilakukan penelitian mengenai "Strategi Kebijakan Mutu dan Standar Produk Ekspor dalam rangka Meningkatkan Daya Saing: Studi Kasus Produk Ekspor Biji Kakao".

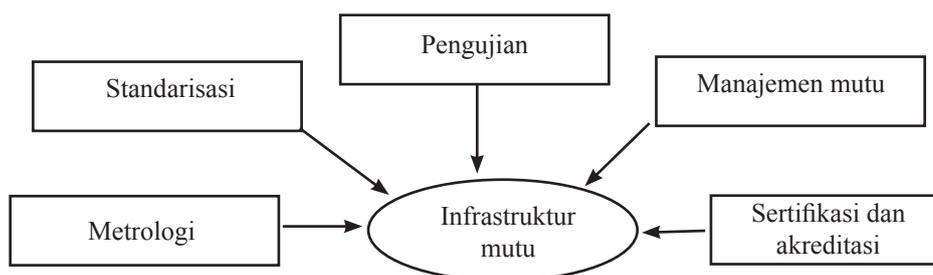
Pemerintah Indonesia melalui Departemen Perindustrian dan Perdagangan (selanjutnya menjadi Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan) mengeluarkan kebijaksanaan berkaitan dengan standarisasi, sertifikasi, akreditasi dan pengawasan mutu. Dalam SK Menperindag nomor 164/MPP/Kep/6/1996, produk ekspor yang ditetapkan dalam pengawasan mutu secara wajib sebanyak 23 produk. Dari 23 produk ekspor, komoditas yang memiliki daya saing tinggi berdasarkan nilai *Revealed Comparative Advantage* (RCA) adalah biji kakao. Walaupun RCA biji kakao Indonesia tinggi, tetapi eksportir sering kehilangan daya saing. Menurut Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, sekitar 70% produksi biji kakao belum memenuhi SNI. Ketidaklayakan biji kakao tersebut karena petani tidak melakukan fermentasi terlebih dahulu sehingga rasa serbuk kakao yang dihasilkan kurang enak. Selain itu, biji kakao masih banyak tercampur kotoran, seperti sisa kulit, sampah, dan kerikil. Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis daya saing biji kakao sebagai produk ekspor yang ditetapkan pengawasannya secara wajib dan menganalisis strategi kebijakan peningkatan standar dan mutu biji kakao dalam rangka peningkatan daya saing.

Penelitian ini menganalisis mutu dan standar biji kakao Indonesia (HS 180100) dengan menggunakan metode AHP (*Analytical Hierarchy Process*). Selain itu, dilakukan analisis daya saing produk ekspor biji kakao ke negara tujuan utama, seperti USA, Malaysia, Jerman, China, Thailand, Belanda, Brazil, India,

dan Singapura dengan metode RCAB (*Revealed Comparative Advantage Bilateral*). Penelitian ini didukung oleh teori infrastruktur mutu. Infrastruktur mutu didukung semua aspek yang berkaitan dengan metrologi, standarisasi, pengujian, manajemen mutu, sertifikasi, dan akreditasi yang berpengaruh terhadap penilaian kesesuaian (*conformity assessment*) termasuk institusi publik dan swasta dalam kerangka peraturan dimana mereka beroperasi (Kementerian Perdagangan, 2007). Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 1.

Metrologi industri merupakan kegiatan untuk menghubungkan hasil pengukuran melalui standar pengukuran, alat ukur, dan membandingkan hasil kalibrasi tersebut dengan persyaratan pengukuran (seperti akurasi, presisi, kesalahan terbesar, dll) yang ditetapkan sebagai persyaratan proses produksi untuk mencapai karakteristik produk yang diinginkan oleh pelanggan. Standar adalah dokumen tertulis yang berisikan peraturan, pedoman, karakteristik suatu barang dan jasa atau proses dan metode yang berlaku umum digunakan secara berulang (BSN, 2010). Standar ditujukan untuk mencapai tingkat keteraturan optimum dalam konteks tertentu. Prinsip yang dianut dalam menyusun standar mengacu kepada standar internasional. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan pengakuan internasional.

Kegiatan akreditasi merupakan rangkaian kegiatan pengakuan formal berupa pemberian, pemeliharaan, perpanjangan, penundaan, dan pencabutan akreditasi lembaga sertifikasi (mencakup sistem mutu, personel, pelatihan, sistem manajemen lingkungan, sistem pengelolaan hutan lestari, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, dan inspeksi teknis), laboratorium teknis/kalibrasi, dan akreditasi dibidang standarisasi lainnya oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang menyatakan bahwa lembaga akreditasi atau laboratorium tersebut telah memenuhi persyaratan untuk melakukan sesuatu standarisasi tertentu.



Gambar 1. Aspek Pendukung Infrastruktur Mutu (Kementerian Perdagangan, 2007).

Sertifikasi adalah proses pengakuan resmi terhadap keabsahan produk, proses, kepemilikan, atau keterangan diatur dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sertifikat sebagai alat untuk menembus pasar internasional merupakan dokumen yang menyatakan suatu produk/jasa sesuai dengan persyaratan standar atau spesifikasi teknis tertentu. Beberapa lembaga sebagai pendukung infrastruktur mutu yang ada di Indonesia pada Gambar 2. Dengan demikian, lembaga di Indonesia yang berwenang menetapkan standar (SNI) adalah BSN. Metrologi, standarisasi, dan kesesuaian mutu memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam mendukung sistem perdagangan internasional yang efisien. Sistem perdagangan yang efisien akan mengurangi hambatan perdagangan (khususnya nontarif *barrier* yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan konsumen).

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam kajian ini berupa data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan para eksportir, LPM, LSPro yang dipilih berdasarkan *purposive sampling*, yaitu *judgement* dan *quota sampling* dengan menggunakan kuesioner dimaksud untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan mengenai standar dan mutu biji kakao. Selain itu, pengumpulan informasi diperoleh melalui FGD (*Focus Group Discussion*) dengan mengundang para pihak yang berkompeten dengan topik kajian. Data sekunder diperoleh dari Badan Standarisasi Nasional (BSN), Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Analisis data menggunakan RCA dan AHP. Analisis RCA diperkenalkan pertama kali oleh Bela Balassa pada tahun 1965 dalam penelitian tentang pengaruh liberalisasi perdagangan luar negeri terhadap keunggulan komparatif hasil industri Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara yang tergabung dalam pasar bersama Eropa (MEE) serta pada tahun 1977 untuk negara yang sama ditambah Kanada dan Swedia. Pada penelitian ini, RCA yang digunakan merupakan RCA Bilateral. Analisis ini dikembangkan oleh *International Trade Centre* yang menganalisis arus perdagangan, indikator keunggulan komparatif bertujuan untuk mengukur spesialisasi yang merupakan indikasi tentang bagaimana suatu negara mengalokasikan sumber daya untuk berbagai industri, di bawah asumsi total perdagangan yang seimbang. Rumus RCA adalah

sebagai berikut:

$$RCA_{icl}^t = \frac{1000}{(X_{i..}^t + M_{i..}^t)} * \left[(X_{icl.}^t - M_{icl.}^t) - (X_{i..}^t - M_{i..}^t) * \frac{(X_{icl.}^t + M_{icl.}^t)}{(X_{i..}^t + M_{i..}^t)} \right]$$

dimana:

$\overline{X_{i..}^t}$ dan $\overline{M_{i..}^t}$ = Total ekspor dan impor negara i pada tahun t

$X_{icl.}^t$ dan $M_{icl.}^t$ = Total ekspor dan impor produk dalam kluster cl di Negara i pada tahun t

$(X_{icl.}^t - M_{icl.}^t)$ = Neraca perdagangan negara i untuk kluster cl pada tahun t

$\frac{(X_{i..}^t + M_{i..}^t)}{(X_{i..}^t + M_{i..}^t)}$ = Besarnya kluster cl di ekspor negara i pada tahun t

$(X_{i..}^t - M_{i..}^t) * \frac{(X_{icl.}^t + M_{icl.}^t)}{(X_{i..}^t + M_{i..}^t)}$ = Ketidakseimbangan teoritikal di negara i untuk kluster cl pada t tahun

Pengolahan data urutan prioritas strategi menggunakan Analisis AHP yang dilakukan dengan *software Expert Choice* 2008. Saaty (1980) menyatakan skala kuantitatif dari 1 sampai 9 untuk menilai perbandingan tingkat kepentingan suatu elemen terhadap elemen lainnya (Tabel 1).

Metode AHP digunakan sebagai pengambil keputusan mengenai kebijakan mutu dan standar produk ekspor tertentu dalam meningkatkan daya saing. Pengambilan keputusan mengenai kebijakan mutu dan standar produk ekspor kakao dalam meningkatkan daya saing memiliki masalah yang kompleks, ditunjukkan dalam struktur hierarki yang menggambarkan hubungan antara tujuan (*goal*), *objectives* (kriteria), *sub-objectives*, dan beberapa alternatif (Gambar 3). Pengambilan keputusan kebijakan standar dan mutu untuk meningkatkan daya saing dilakukan dengan FGD. Peserta FGD terdiri atas tenaga ahli dibidangnya, yaitu para eksportir, pengusaha, asosiasi, lembaga uji standar dan mutu, dan pemerintah.



Gambar 2. Infrastruktur mutu di Indonesia. (Kementerian Perdagangan, 2007)

Tabel 1. Skala penilaian perbandingan pasangan

Intensitas kepentingan	Keterangan	Penjelasan
1	Kedua elemen sama pentingnya	Dua elemen mempunyai pengaruh yang sama besar terhadap tujuan
3	Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen yang lainnya	Pengalaman dan penilaian sedikit menyokong satu elemen dibandingkan elemen lainnya
5	Elemen yang satu lebih penting daripada elemen lainnya.	Pengalaman dan penilaian sangat kuat menyokong satu elemen dibandingkan elemen lainnya.
7	Satu elemen jelas lebih mutlak penting daripada elemen lainnya.	Satu elemen yang kuat disokong dan dominan terlihat dalam praktek.
9	Satu elemen mutlak penting daripada elemen lainnya.	Bukti yang mendukung elemen yang satu terhadap elemen lain memiliki tingkat penegasan tertinggi yang mungkin menguatkan.
2,4,6,8	Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan yang berdekatan.	Nilai ini diberikan bila ada dua kompromi di antara dua pilihan.
Kebalikan	Jika untuk aktivitas i mendapat satu angka dibanding dengan aktivitas j maka j mempunyai nilai kebalikannya dibanding dengan i.	

Sumber : Suryadi dan Ramdhani, 2000

Indonesia merupakan negara penghasil biji kakao terbesar ke-3 dunia setelah Pantai Gading dan Ghana pada tahun 2009. Peringkat tersebut membaik pada tahun 2010 sehingga Indonesia menjadi produsen kakao terbesar ke-2 dunia dengan produksi 844.630 ton, di bawah Pantai Gading dengan produksi 1,38 juta ton. Hal ini menunjukkan bahwa biji kakao Indonesia memiliki daya saing yang tinggi. Akan tetapi, seringkali ekspor biji kakao mengalami penolakan dari negara tujuan ekspor karena mutu dan standar belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Terkait dengan hal tersebut, melalui FGD diidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penentu dalam strategi peningkatan mutu dan standar ekspor biji kakao, seperti regulasi, infrastruktur pengujian, prosedur dan mekanisme, biaya, dan kerja sama harmonisasi yang secara keseluruhan berkaitan dengan peningkatan mutu dan standar biji kakao. Hasil identifikasi dan analisis dari diskusi pihak-pihak yang ahli dalam mutu dan standar biji kakao akan digunakan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang berupa strategi peningkatan. Kerangka pemikiran dari penelitian ini pada Gambar 4.

HASIL

Daya Saing Produk Biji Kakao (*Revealed Comparative Advantage Bilateral/RCAB*)

Indonesia merupakan negara ke-3 terbesar pemasok kakao dunia, yaitu sebesar 13,6%. Sementara itu, pemasok kakao dunia lainnya adalah Pantai Gading sebesar 38,3%, Ghana 20,2%, Kamerun 5,1%, Brasil 4,4%, dan Ekuador 3,1% (ICCO, 2007). Walaupun

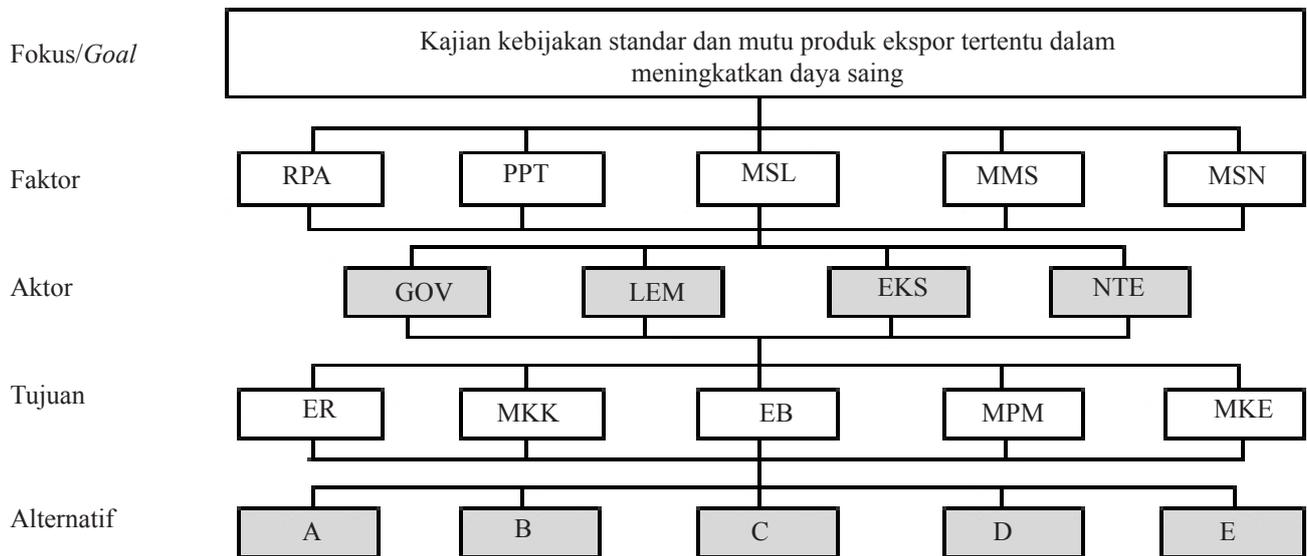
Indonesia sebagai negara eksportir terbesar ketiga di dunia, tetapi ada hambatan untuk menjual komoditas unggulannya ke pasar Internasional. Meskipun produksi biji kakao Indonesia secara signifikan terus meningkat, tetapi mutu yang dihasilkan sangat rendah dan beragam, antara lain kurang terfermentasi, tidak cukup kering atau tingginya kadar air (7%), ukuran biji tidak seragam, kadar kulit tinggi, keasaman tinggi, cita rasa sangat beragam, dan kadar kotoran yang tinggi (8–10%) (Direktorat Jendral Perkebunan, 2007). Kondisi daya saing komoditas kakao Indonesia di pasar beberapa negara mitra dagang selama periode 1990–2010 dapat dilihat pada Gambar 5.

Komoditas kakao Indonesia di pasaran Jerman dan Brazil selama periode 1997–2010 sangat berdaya saing, sedangkan periode sebelumnya tidak terjadi perdagangan antara Indonesia dan kedua negara tersebut. Jika dilihat secara agregat maka kakao Indonesia memiliki daya saing dengan rata-rata nilai RCAB lebih dari nol (Gambar 6). RCAB Indonesia dengan Jerman memiliki rata-rata nilai tertinggi selama periode 1997–2010, yaitu sebesar 87,6 (RCAB>0). Hal ini menunjukkan bahwa kakao merupakan komoditas yang memiliki daya saing yang tinggi di pasar dunia atau dapat dikatakan bahwa komoditas kakao merupakan komoditas yang memiliki kemampuan paling baik diantara negara-negara lainnya dalam hal penetrasi ke pasar dunia selama periode 1997–2010. Tingginya nilai rata-rata RCAB Indonesia untuk komoditas kakao karena memiliki rata-rata jumlah ekspor yang paling tinggi. Dalam pasar Eropa, industri coklat Eropa telah menetapkan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh *importer*, seperti standar mutu biji, persyaratan

kesehatan, lingkungan, biji kakao harus difermentasikan terlebih dahulu sebelum diekspor.

Walaupun sebagai produsen kakao terbesar ke-3 di dunia, tetapi perdagangan ekspor Indonesia ke pasar UE (Uni Eropa) hanya menduduki posisi ke-6, yaitu dengan pangsa sebesar 2,46% atau jauh di bawah

kemampuan produksinya, sekitar 1/6 dari total produksi dunia. Negara pesaing utama Indonesia di pasar UE adalah Pantai Gading, Ghana, Nigeria, Kamerun yang mendapat preferensi bea masuk karena tergabung dalam Africa, Carribean, Pacific (ACP) *Countries*. Sementara itu, pesaing lainnya seperti Swiss memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan UE. Kakao dan



Keterangan:

Tingkat 1 : *Goal* yang menjadi inti atau fokus dari permasalahan yang ingin dipecahkan dengan metode AHP (FOKUS)

Tingkat 2 : Hal-hal yang menjadi faktor penentu peningkatan mutu dan standar produk ekspor tertentu dalam meningkatkan daya saing (FAKTOR)

RPA : Regulasi perdagangan antar negara

PPT : Infrastruktur pengujian mutu

MSL : Biaya peningkatan mutu dan standar produk ekspor internasional

MMS : Mekanisme/prosedur peningkatan mutu dan standar produk ekspor

MSN : Harmonisasi mutu dan standar produk ekspor nasional dengan internasional

Tingkat 3 : Aktor-aktor yang berperan dalam peningkatan mutu dan standar produk ekspor tertentu dalam meningkatkan daya saing (AKTOR)

GOV : Pemerintah

LEM : Lembaga mutu dan standar

EKS : Eksportir

NTE : Negara tujuan ekspor

Tingkat 4 : Tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam peningkatan standar dan mutu ekspor (TUJUAN)

ER : Eliminasi regulasi yang menghambat

MKK : Meningkatkan kuantitas dan kualitas lembaga infrastruktur pengujian mutu dan standar

EB : Eliminasi biaya yang tidak relevan

MPM : Mempermudah prosedur dan mekanisme peningkatan mutu dan standar

MKE : Meningkatkan kerja sama peningkatan mutu dan standar dengan negara tujuan ekspor

Tingkat 5 : Hal-hal yang dirumuskan sebagai pilihan yang akan direkomendasikan sebagai hasil untuk mencapai tujuan penelitian (ALTERNATIF)

A : Fasilitasi regulasi

B : Fasilitasi terkait infrastruktur pengujian standar dan mutu

C : Fasilitasi hambatan biaya dalam rangka peningkatan mutu dan standar

D : Memfasilitasi kemudahan prosedur dan mekanisme peningkatan mutu dan standar

E : Memfasilitasi kerja sama harmonisasi standar dan mutu internasional

Gambar 3. Struktur hierarki analisis kebijakan standar dan mutu produk ekspor tertentu dalam meningkatkan daya saing

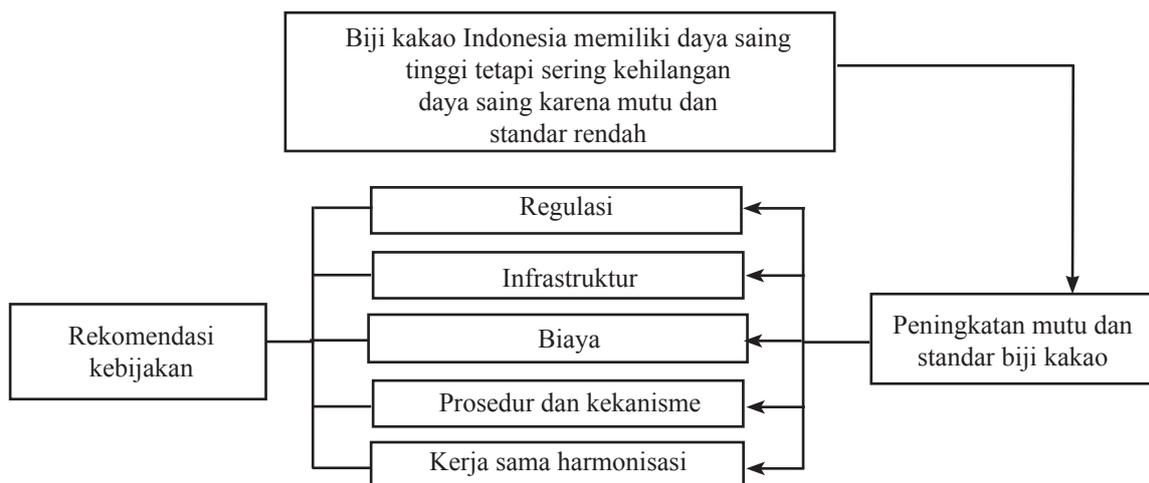
produk kakao dari negara-negara tersebut menjadi sangat berdaya saing karena memiliki fasilitas bebas bea masuk jika dibandingkan dengan produk kakao Indonesia.

Analisis Strategi Peningkatan Standar dan Mutu Produk Ekspor Biji Kakao: Pendekatan AHP

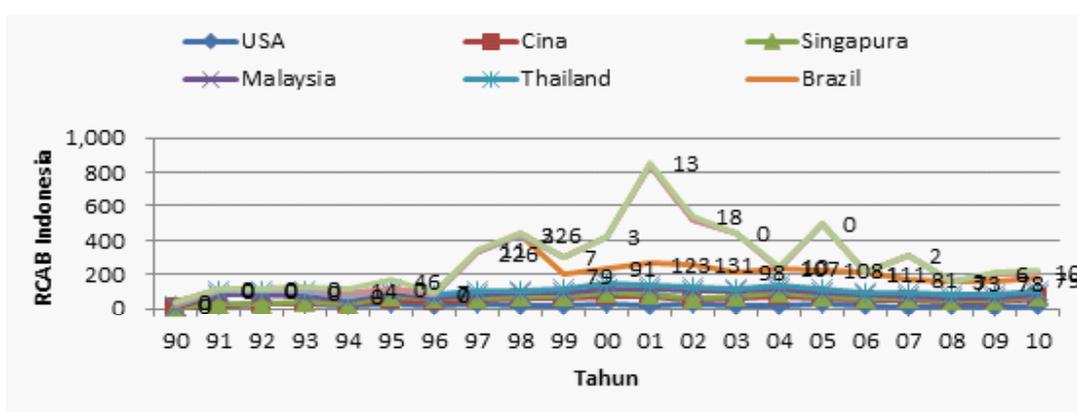
Hasil analisis metode AHP, peserta FGD melakukan penilaian dengan teknik komparasi berpasangan (*pairwise comparison*) terhadap elemen-elemen pada suatu tingkat hierarki dengan memberikan bobot numerik. FGD pertama, diselenggarakan di Makassar dan kedua di Jakarta. *Stakeholder* yang diundang untuk FGD Makassar terdiri atas Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, Balitbang Provinsi Sulawesi Selatan, Balai Besar POM Makassar, UPTD BPPMB Disperindag, Eksportir antara lain PT Bumi Niaga Pratama, PT Olam, Laboratorium Uji Mutu, seperti PT Sucofindo

dan ASKINDO. Untuk FGD Jakarta, *stakeholder* yang diundang, seperti Pusat Standarisasi, Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu, Industri Kementerian Perindustrian, Pusat Kerja sama Standardisasi, Badan Standardisasi Nasional, Direktorat Bina Pengolahan dan pemasaran Hasil Hutan, Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan, dan Kementerian Kehutanan.

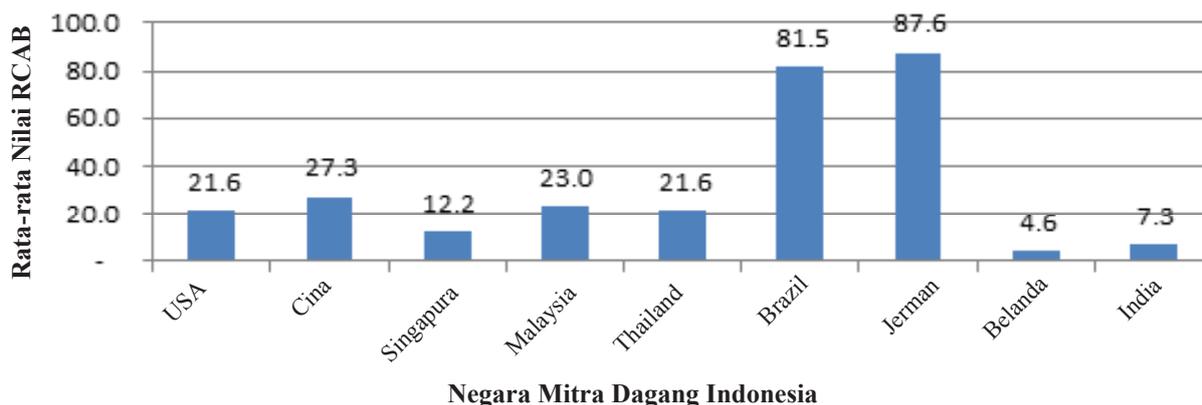
Hierarki Pertama adalah peubah faktor, yaitu identifikasi faktor-faktor penentu model pengambilan keputusan untuk analisis kebijakan standar dan mutu produk ekspor kakao dalam peningkatan daya saing. Peubah faktor tersebut, meliputi 1) regulasi perdagangan antar negara (RPA), 2) mutu dan standar produk ekspor nasional dan internasional (MSN), 3) biaya peningkatan mutu dan standar produk ekspor internasional (MSL), 4) mekanisme/prosedur peningkatan mutu dan standar produk ekspor (MMS), dan 5) infrastruktur pengujian mutu (PPT).



Gambar 4. Kerangka pemikiran penelitian



Gambar 5. RCAB Indonesia dengan negara mitra dagang produk ekspor biji kakao



Gambar 6. Rata-rata nilai RCAB Indonesia dengan negara mitra dagang untuk produk ekspor biji kakao, periode 1990–2010

1. Level faktor

Hasil perbandingan faktor memperlihatkan peningkatan mutu dan standar produk ekspor nasional dan internasional serta regulasi perdagangan antar negara adalah elemen penting dalam penentuan strategi kebijakan standar dan mutu untuk meningkatkan daya saing. Faktor ini memiliki bobot tertinggi, yaitu 0,238 dan 0,217 (Tabel 2).

Hasil ini sesuai dengan observasi di lapangan. Banyak eksportir belum mengutamakan standar dan mutu yang disyaratkan oleh negara tujuan ekspor. Mereka menyatakan bahwa setiap produk yang diekspor memiliki pasar sendiri. Pada kondisi saat ini, eksportir menyesuaikan dengan standar yang disyaratkan oleh negara tujuan ekspor, mengingat setiap negara menetapkan persyaratan yang berbeda. Menurut eksportir, kakao Indonesia memiliki kelebihan yaitu tidak mudah meleleh dan cocok digunakan untuk *blending* sehingga pasar kakao Indonesia memiliki peluang cukup terbuka untuk beberapa negara tujuan ekspor. Namun, harus dikaji lebih mendalam adalah sebab mereka tidak mengalami penolakan oleh negara tujuan ekspor. Hal tersebut terjadi karena beberapa standar dan mutu seperti fermentasi belum terpenuhi sehingga harga yang diterima lebih rendah dari seharusnya. Hal tersebut akan mengurangi nilai ekspor biji kakao Indonesia. Dalam jangka panjang, kesadaran petani maupun eksportir (hulu dan hilir) mengenai persyaratan standar dan mutu harus menjadi perhatian karena pesaing lebih memiliki standar dan mutu yang disyaratkan negara tujuan ekspor.

Regulasi perdagangan yang terkait standar (*health and safety*) mensyaratkan produk ekspor kakao memiliki standar yang ditetapkan, seperti kandungan residu pestisida. Hasil FGD Makassar, kakao Indonesia mengandung residu pestisida, sedangkan FGD Jakarta, *stakeholder* menyatakan bahwa ekspor kakao Indonesia diklaim terkontaminasi *Cadmium* (Cd). Akan tetapi, pada tahun 2009 PPMB menggunakan sembilan sampel daerah sentra produksi kakao untuk melakukan pengujian terhadap produk kakao yang diindikasikan terkontaminasi Cd. Hasil uji menunjukkan bahwa produk kakao Indonesia tidak terkontaminasi Cd (PPMB, 2010). Beberapa kemungkinan yang muncul adalah isu tersebut hanya untuk menghambat ekspor kakao Indonesia, perbedaan metode uji, dan perbedaan alat uji.

Tabel 2. Susunan bobot dan prioritas hasil pengolahan antar elemen pada level faktor

No.	Indikator	Bobot	Peringkat
1	Regulasi perdagangan antar negara (RPA)	0,217	2
2	Mutu dan standar produk ekspor nasional dan internasional (MSN)	0,238	1
3	Biaya peningkatan mutu dan standar produk ekspor internasional (MSL)	0,177	4
4	Mekanisme/prosedur peningkatan mutu dan standar produk ekspor (MMS)	0,197	3
5	Infrastruktur pengujian mutu (PPT)	0,171	5

Hasil informasi dinas terkait, produk kakao dapat terkontaminasi Cd karena beberapa hal, seperti pupuk, residu pestisida, tanah yang mengandung Cd, dan penjemuran di atas aspal. Bobot yang rendah pada jumlah infrastruktur menunjukkan *stakeholder* memiliki anggapan bahwa faktor jumlah infrastruktur mutu kurang berperan penting dalam kebijakan standar dan mutu produk ekspor kakao terhadap peningkatan daya saing. Hasil observasi lapang menunjukkan beberapa infrastruktur mutu belum mampu melayani secara keseluruhan uji mutu yang akan dilakukan eksportir. Hal ini terjadi di UPTD Balai Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang (BPPMB) yang merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bawah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan dimana memiliki kendala dalam operasional pengujian mutu tersebut yaitu adanya hambatan terkait sarana/prasarana dan infrastruktur (terkait pengadaan alat uji). Insentif pengadaan laboratorium dan fasilitas mutu lainnya dan kualitas pelayanan yang memadai akan mendorong peran yang lebih berarti dari infrastruktur mutu terhadap peningkatan standar dan mutu biji kakao yang akan diekspor.

2. Level aktor

Hasil pengolahan horizontal, hierarki kedua adalah level aktor. Peubah aktor merupakan identifikasi pelaku yang memiliki peran dalam kebijakan standar dan mutu produk ekspor kakao dalam peningkatan daya saing (Tabel 3). Peubah aktor tersebut, seperti (1) pemerintah (GOV), (2) lembaga mutu dan standar (LEM), (3) eksportir (EKS), dan (4) negara tujuan ekspor (NTE). Hasil perbandingan aktor menunjukkan negara tujuan ekspor memiliki peranan penting dengan bobot sebesar 0,274. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melakukan kerja sama harmonisasi standar dan mutu untuk memenuhi persyaratan standar dan mutu negara tujuan ekspor melalui negosiasi. Aktor

pemerintah merupakan aktor kedua yang terpenting dengan bobot 0,245. Hal ini menunjukkan pentingnya peran pemerintah sebagai fasilitator terkait kebijakan standar dan mutu biji kakao untuk meningkatkan daya saing, sebagai contoh kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Perkebunan Sulawesi Selatan dalam proses *on farm*, seperti *replanting*, intensifikasi, dan sistem tumpang sari sangat membantu para petani kakao untuk meningkatkan standar, mutu, dan jumlah produksi kakao.

Peningkatan produksi dengan memperhatikan dampak terhadap lingkungan sekitar dilakukan program sistem kakao lestari (proses budi daya yang ramah/pedulih terhadap kelestarian lingkungan) dan pola pendampingan, yang berkesinambungan. Beberapa program lain yang diterapkan pemerintah, antara lain program BERNAS (Kementerian Pertanian), program pembinaan petani dan program peningkatan produksi, dan kualitas biji kakao. Kebijakan untuk meningkatkan standar dan mutu dari kementerian Perdagangan, mengeluarkan SK Menperindag No. 164/MPP/Kep/6/1996 tentang produk ekspor yang ditetapkan pengawasan mutunya yang bertujuan mencegah ekspor produk-produk Indonesia yang dibawah mutu standar dan mempertahankan mutu produk ekspor. Kebijakan lain untuk memperkuat kerja sama perdagangan yang dilakukan Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi adalah dengan melakukan kesepakatan kerja sama antara BSN dan *Saudi Standards, Metrology and Quality Organization* (SASO) dari Arab Saudi. Produk yang diekspor Indonesia tidak perlu menjalani pengecekan laboratorium di negara tersebut, namun cukup dilakukan di Indonesia (BSN, 2012). Hasil olahan AHP secara vertikal memberikan hasil yang sama (konsisten) dengan pengolahan secara horizontal. Secara vertikal hasil pengolahannya dapat disajikan pada Tabel 4.

Tabel 3. Susunan bobot dan prioritas hasil pengolahan horizontal antar elemen pada level aktor

Aktor	Faktor 1	Faktor 2	Faktor 3	Faktor 4	Faktor 5	Bobot faktor	Bobot aktor	Peringkat
1. Pemerintah (GOV)	0,235	0,213	0,234	0,277	0,278	0,217	0,245214	2
2. Lembaga mutu dan standar (LEM)	0,218	0,223	0,228	0,258	0,303	0,238	0,243375	3
3. Eksportir (EKS)	0,252	0,244	0,292	0,21	0,182	0,177	0,236932	4
4. Negara tujuan ekspor (NTE)	0,295	0,319	0,246	0,254	0,237	0,197	0,274044	1
						0,171		

Tabel 4. Susunan bobot dan prioritas hasil pengolahan vertikal antar elemen pada level aktor

Indikator	Bobot	Peringkat
Pemerintah (GOV)	0,245214	2
Lembaga mutu dan standar (LEM)	0,243375	3
Eksportir (EKS)	0,236932	4
Negara tujuan ekspor (NTE)	0,274044	1

3. Level tujuan

Analisis pada level tujuan dilakukan untuk mengetahui prioritas dari tujuan yang ingin dicapai dalam kajian kebijakan standar dan mutu dengan tujuan meningkatkan daya saing. Hasil pengolahan horizontal, hierarki ketiga, peubah tujuan dikategorikan menjadi lima, yaitu 1) eliminasi regulasi yang menghambat, 2) meningkatkan kuantitas dan kualitas lembaga infrastruktur pengujian standar, 3) eliminasi biaya yang tidak relevan, 4) mempermudah prosedur dan mekanisme peningkatan standar dan mutu ekspor, dan 5) meningkatkan kerja sama peningkatan standar dan mutu dengan negara tujuan.

Hasil pengolahan secara vertikal maupun horizontal pada level tujuan. Level ini bertujuan meningkatkan kuantitas dan kualitas lembaga infrastruktur pengujian standar dan mutu memiliki bobot tertinggi dengan skor 0,209 (Tabel 5). Hal ini menunjukkan bahwa analisis kebijakan standar dan mutu untuk meningkatkan daya saing produk ekspor kakao, kuantitas maupun kualitas lembaga infrastruktur pengujian standar, serta mutu merupakan ujung tombak peningkatan standar dan mutu itu sendiri.

Jumlah lembaga infrastruktur pengujian standar dan mutu yang masih relatif terbatas menyebabkan biaya yang tinggi, sedangkan kompetisi atau persaingan

rendah. Selain itu, kualitas infrastruktur mutu harus ditingkatkan. Kualitas infrastruktur mutu menyangkut sarana prasarana atau alat uji, metode uji, dan keahlian dari SDM lembaga pengujian mutu. Mutu dan standar nasional harus terhubung dengan mutu dan standar yang ditetapkan di tingkat internasional. Hasil AHP vertikal untuk tujuan memberikan hasil yang sama (konsisten) dengan pengolahan secara horizontal. Secara vertikal hasil pengolahannya dapat disajikan pada Tabel 6.

4. Alternatif strategi

Hasil AHP untuk level alternatif strategi, fasilitas terkait dengan infrastruktur pengujian standar dan mutu untuk meningkatkan daya saing memiliki bobot tertinggi, yaitu 0,406 (Tabel 7). Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya meningkatkan infrastruktur mutu dari segi jumlah dan kualitas. Fasilitas regulasi menduduki *ranking* kedua dalam analisis kebijakan peningkatan standar dan mutu untuk meningkatkan daya saing ekspor kakao dengan bobot 0,237. Negosiasi berkaitan dengan regulasi mengenai standar dan mutu yang diterapkan negara tujuan ekspor diperlukan agar eksportir dapat memenuhi ketentuan yang berlaku. Peran pemerintah sebagai negosiator dengan pihak negara tujuan ekspor sangat diperlukan sehingga transmisi mengenai regulasi yang diterapkan mengenai standar dan mutu dapat dipenuhi eksportir Indonesia. Kedua alternatif strategi tersebut akan efektif apabila peningkatan standar dan mutu tidak hanya dipenuhi pada level hilir, tetapi juga pada level hulu. Sosialisasi pada petani terhadap pentingnya peningkatan standar dan mutu untuk penetrasi pasar perlu dilakukan. Penetrasi pasar pada negara tujuan ekspor akan berdampak positif pada kesejahteraan petani dengan syarat harga internasional ditransmisikan ke tingkat petani.

Tabel 5. Susunan bobot dan prioritas hasil pengolahan horizontal antar elemen pada level tujuan

Tujuan	Aktor 1	Aktor 2	Aktor 3	Aktor 4	Bobot aktor	Bobot tujuan	Peringkat
Eliminasi regulasi yang menghambat (ER)	0,173	0,166	0,2	0,192	0,2452	0,183	5
Meningkatkan kuantitas dan kualitas lembaga infrastruktur pengujian (MKK)	0,211	0,24	0,177	0,209	0,2434	0,209	1
Eliminasi biaya yang tidak relevan (EB)	0,215	0,206	0,201	0,172	0,2369	0,198	4
Memperoleh prosedur dan mekanisme peningkatan mutu dan standar (MPM)	0,207	0,193	0,221	0,187	0,2740	0,201	3
Meningkatkan kerja sama peningkatan standar dan mutu dengan negara tujuan ekspor (MKE)	0,193	0,195	0,201	0,24	-	0,208	2

Tabel 6. Susunan bobot dan prioritas hasil pengolahan vertikal antar elemen pada level tujuan

No.	Indikator	Bobot	Peringkat
1	Eliminasi regulasi yang menghambat (ER)	0,183	5
2	Meningkatkan kuantitas dan kualitas lembaga infrastruktur pengujian standar dan mutu (MKK)	0,209	1
3	Eliminasi biaya yang tidak relevan (EB)	0,198	4
4	Mempermudah prosedur dan mekanisme peningkatan standar dan mutu ekspor (MPM)	0,201	3
5	Meningkatkan kerja sama dalam rangka peningkatan standar dan mutu dengan negara tujuan ekspor (MKE)	0,208	2

Tabel 7. Susunan bobot dan prioritas hasil pengolahan horizontal antar elemen pada level alternatif strategi

Tujuan	Aktor 1	Aktor 2	Aktor 3	Aktor 4	Aktor 5	Bobot aktor	Bobot tujuan	Peringkat
Fasilitasi regulasi (A)	0,232	0,241	0,249	0,227	0,237	0,182825	0,237	2
Fasilitasi terkait infrastruktur pengujian standar dan mutu (B)	0,412	0,404	0,392	0,406	0,415	0,209362	0,406	1
Fasilitasi hambatan biaya dalam rangka peningkatan standar dan mutu (C)	0,119	0,129	0,123	0,13	0,121	0,197615	0,124	4
Memfasilitasi kemudahan prosedur dan mekanisme peningkatan standar dan mutu ekspor (D)	0,078	0,077	0,078	0,079	0,078	0,201339	0,078	5
Memfasilitasi kerja sama harmonisasi standar dan mutu internasional (E)	0,159	0,15	0,158	0,158	0,149	0,208178	0,155	3

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sesuai hasil nilai rata-rata RCAB, komoditas kakao Indonesia di pasar Jerman dan Brazil sangat berdaya saing, disusul Cina, USA, dan Malaysia. Secara *series*, nilai RCAB biji kakao cenderung stabil untuk semua negara tujuan ekspor utama, kecuali ke India. Hal ini menunjukkan terbukanya peluang ekspor biji kakao Indonesia ke Jerman. Peluang ini semakin terbuka apabila mutu dan standar biji kakao Indonesia memenuhi persyaratan negara tujuan ekspor. Analisis strategi kebijakan peningkatan mutu dan standar ekspor biji kakao adalah 1) fasilitasi infrastruktur pengujian mutu dan standar, 2) fasilitasi regulasi, 3) fasilitasi kerja sama harmonisasi mutu dan standar internasional, 4) fasilitasi hambatan biaya dalam rangka peningkatan mutu dan standar, 5) fasilitasi kemudahan prosedur dan mekanisme peningkatan mutu dan standar. Hasil AHP menunjukkan rekomendasi strategi peningkatan standar dan mutu produk ekspor biji kakao serta meningkatkan fasilitasi infrastruktur standar dan mutu.

Saran

Beberapa saran yang dapat direkomendasikan dari penelitian ini adalah 1) biji kakao yang berdaya saing tinggi salah satunya ditentukan oleh kualitas benih dan proses budi daya. Saat ini, hampir sebagian

besar benih biji kakao belum terstandarisasi dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan benih kakao yang bermutu dan telah disertifikasi. 2) Diperlukan riset untuk memperpendek waktu fermentasi. Riset ini dapat dilakukan oleh pusat riset kakao yang dibentuk oleh pemerintah. 3) Penolakan isu terkontaminasi bahan kimia diatasi dengan memberikan argumentasi disertai bukti ilmiah berupa uji mutu yang diterima secara internasional. Selain itu, perlu dilakukan inisiasi harmonisasi standar dan mutu, misalnya BSN dengan SASO dari Arab Saudi, produk ekspor tidak perlu lagi menjalani pengecekan laboratorium di negara tersebut dan cukup dilakukan di Indonesia. 4) Peningkatan kapasitas (IT & staf) dan peningkatan jumlah, ruang lingkup dan kompetensi infrastruktur mutu baik di laboratorium, lembaga inspeksi dan sertifikasi. 5) Dalam jangka panjang agar daya saing dari sisi standar dan mutu meningkat perlu dibentuk *Quality Infrastructur* (QI) Nasional berdasarkan lima pilar, yaitu standarisasi, metrologi, pengujian, akreditasi, dan sertifikasi yang selanjutnya dibentuk Pusat Metrologi Nasional dan diharapkan berfungsi seperti National Metrology of German, yaitu *Physikalisch Technische Bundesanstalt* (PTB). Kedudukan QI nasional bisa dibawah naungan Kementerian Perdagangan atau Kementerian Riset dan Teknologi, agar QI berjalan sebagai suatu sistem maka diperlukan koordinasi antar instansi baik pemerintah maupun swasta. 6) Membangun laboratorium acuan untuk sektor (produk) terpilih.

DAFTAR PUSTAKA

- [BSN]Badan Standardisasi Nasional. 2012. *Informasi Standar Nasional Indonesia Produk Unggulan untuk Mendukung MP3EI*. Jakarta: BSN.
- [BPPMB] Balai Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. 2010. *Profil UPTD Balai Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang (BPPMB) Provinsi Sulawesi Selatan*. Makasar: BPPMB.
- Direktorat Jendral Perkebunan. 2007. *Statistik Perkebunan Indonesia 2004-2006*. Jakarta: Kementerian Pertanian.
- [ICCO] International Cocoa Organization. 2008. *Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics, Vol XXXIV No. 3. Cocoa year 2007/2008*. London: International Cocoa Organization.
- Kementerian Perdagangan. 2007. *Mengintegrasikan Produk Ekspor Indonesia ke Perdagangan Global*. Jakarta: Direktorat Standardisasi.
- Suryadi K, Ramdhani A. 2000. *Sistem Pendukung Keputusan: Suatu Wacana Struktural Idealisasi dan Implementasi Konsep Pengambilan Keputusan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.